RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH

2026



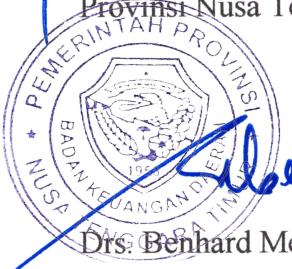
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2026 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2026 bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun 2026 ini mengacu pada Perubahan RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Tahun 2026 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Kupang, Juli 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud Dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja Badan Keuangan Daerah 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 ..... **4**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2024 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah 13

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 ..... **26**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **35**

BAB V PENUTUP **59**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	15
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	29
Tabel 3.2	Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	31
Tabel 3.3	Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah	35
Tabel 4.2	Prioritas Daerah yang dijabarkan kedalam Sub Kegiatan	43
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan Rencana Kerja 2026 dengan berpedoman pada Renstra PD, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD Tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai Pedoman Kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategi lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun 2024.

Proses Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Perubahan Renstra 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta sejalan dengan visi pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Badan Keuangan Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Gubernus Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;

   b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

   c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

   d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.'
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan:
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan:
   - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
   - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
   - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
   - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Tahun 2024

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	**2**					**KEUANGAN**									
						Badan Keuangan Daerah		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	**2**	**1**	**1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
5	2	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap	19 Lap
5	2	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
5	**2**	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan
5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap
5	2	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	**2**	**1**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	3	5	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	**2**	**1**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	1	1	1	1
5	2	1	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	15	15	15	15	15	15
5	2	1	1	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan – undangan	15	10	10	10	10	10	10	10
5	**2**	**1**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	1	1	6	**2**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**
5	2	1	1	6	**3**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Dok	4 Dok	4 Dok
5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	**2**	**1**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Unit	2 Unit	2 Unit
5	2	1	1	7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	1	7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**2**	**1**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	**2**	**1**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
5	2	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
5	2	1	1	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
5	**2**	**1**	**1**	**10**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Persentase Ketercapaian Fasilitasi Keprotokolan**	-	-	-	-	-	**100%**	-	-
						Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	-	-	-	-	1 Lap	-	-
5	**2**	**2**	**1**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	**2**	**2**	**1**	**1**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok
5	**2**	**2**	**1**	**2**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok
5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	22 Dok	22 Dok	22 Dok
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	5 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	2	1	2	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsilidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	**2**	**2**	**1**	**3**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Haisl Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	3 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	48 Dok	12 Dok	12 Dok
5	**2**	**2**	**1**	**4**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

NO						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1
5	2	2	1	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	4	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan – LO, dan Beban	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Dok	18 Dok	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
5	2	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	**2**	**2**	**1**	**5**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Lap	30 Lap	30 Lap

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 melaksanakan 2 (Dua) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perubahan 2024-2026 adalah Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan dengan target 100 % setiap tahun dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu target 100 % setiap tahun (sejak tahun anggaran 2025). Berikut adalah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai Target/ Standard (IKU, SPM, IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100%	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur

perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.
3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.
4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Keuangan Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Badan Keuangan Daerah

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				BADAN KEUANGAN DAERAH				**781.634.764.109,00**					**781.634.764.109,00**	
5	**2**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Kota Kupang, Jakarta**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**18.188.331.972,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Kota Kupang, Jakarta**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**18.188.331.972,00**	
5	**2**	**01**	**1.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**409.894.096,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**409.894.096,00**	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	65.246.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	65.246.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	91.310.800,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	'Kota Kupang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	91.310.800,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	76.903.727,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	'Kota Kupang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	76.903.727,00	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	76.433.569,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	76.433.569,00	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang			50.000.000,00			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000,00	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang			50.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	**2**	**01**	**1.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**11.562.328.600,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**11.562.328.600,00**	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/ bulan	9.070.629.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/ bulan	9.070.629.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.023.606.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.023.606.600,00	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	150.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	150.000.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	75.330.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	75.330.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	55.423.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	55.423.000,00	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	65.519.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	65.519.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	18 Lap	75.509.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	18 Lap	75.509.000,00	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	46.312.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	46.312.000,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	**2**	**01**	**1.03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**20.000.000,00**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**20.000.000,00**	
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
				Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000.000,00	Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	10.000.000,00	
5	**2**	**01**	**1.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**335.843.000,00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**335.843.000,00**	
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	141.079.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	141.079.000,00	
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	91.079.000,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	91.079.000,00	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	50.000.000,00	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	53.685.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	53.685.000,00	
5	**2**	**01**	**1.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.600.775.956,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**1.600.775.956,00**	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.079.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.079.000,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.189.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.189.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355.243.520,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355.243.520,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	72.500.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	72.500.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Kupang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Kupang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kupang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	454.729.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kupang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	454.729.000,00	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	419.129.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	419.129.000,00	
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	31.906.436,00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	31.906.436,00	
5	**2**	**01**	**1.07**	**Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**234.824.000,00**	**Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**234.824.000,00**	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Kupang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	38.824.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Kupang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	38.824.000,00	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	196.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	196.000.000,00	
5	**2**	**01**	**1.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.723.846.320,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**3.723.846.320,00**	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	36.565.400,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	36.565.400,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	780.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	780.000.000,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2.907.280.920,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2.907.280.920,00	
5	**2**	**01**	**1.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**300.820.000,00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kupang**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**300.820.000,00**	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Kupang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	236.820.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Kupang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	236.820.000,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	44.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	44.000.000,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Kupang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	
5	**02**	**02**		**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**763.446.432.137,00**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**763.446.432.137,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**11.036.154.325,00**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**11.036.154.325,00**	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Kupang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Unit	473.651.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Kupang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	473.651.000,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	516.447.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	516.447.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	159.014.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	34 Dok	159.014.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	367.722.800,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	34 Dok	367.722.800,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	3.049.323.362,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	3.049.323.362,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dok	3.025.873.200,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dok	3.025.873.200,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Kupang, Jakarta, Kab/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	3.444.122.963,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Kupang, Jakarta, Kab/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	22 Dok	3.444.122.963,00	
5	**02**	**02**	**1.02**	**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu**	**100%**	**2.272.027.005,00**	**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu**	**100%**	**2.272.027.005,00**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	434.038.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan	434.038.000,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	435.568.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan	435.568.000,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	452.694.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan	452.694.000,00	
	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	5 Dok	738.006.500,00	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	738.006.500,00	
	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah BLUD yang diasistensi	17 Lembaga	110.170.000,00	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah BLUD yang diasistensi	17 Lembaga	110.170.000,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	101.550.505,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	101.550.505,00	
5	**02**	**02**	**1.03**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Kupang Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**2.382.903.796,00**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Kupang Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**2.382.903.796,00**	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	433.044.296,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	433.044.296,00	
				Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD		Jumlah Dokumen Haisl Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	322.607.600,00	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD		Jumlah Dokumen Haisl Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	322.607.600,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	404.848.400,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	404.848.400,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	632.832.200,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 laporan	632.832.200,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dok	589.571.300,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	589.571.300,00	
5	**02**	**02**	**1.04**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**2.671.638.502,00**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**2.671.638.502,00**	
				Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok	333.735.212,00	Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dok	333.735.212,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Lap	560.726.990,00	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Lap	560.726.990,00	
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Lap	770.670.000,00	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Lap	770.670.000,00	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	1.006.506.300,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Kupang, Jakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	1.006.506.300,00	
5	**02**	**02**	**1.05**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**745.083.708.509,00**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Kupang, 22 Kab/Kota**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**100%**	**745.083.708.509,00**	
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lap	47.206.923.484,00	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	47.206.923.484,00	
				Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	46.356.898.400,00	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	46.356.898.400,00	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	22.180.954.686,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	22.180.954.686,00	

NO				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Lap	629.338.931.939,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Kupang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan	629.338.931.939,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPD NTT Tahun 2024-2026 Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan danpertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. **Tolok ukur dan target kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. **Optimalisasi Belanja**. Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka prencanaan dan pangganggaran telah menggunakan e-

planning dan e-budgeting. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

   Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.

   Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.
3. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai.

   Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
   b. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :

a. Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
b. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.

3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai yaitu :
   a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
   b. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efesien, dan responsif terhadap lingkungannya.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	• Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD. • Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu. • Persentase Perangkat Daerah dengan

					realisasi belanja diatas 80%. • Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT. • Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran. • Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. • Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD.
				Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	• Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perubahan APBD secara tepat waktu. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu. • Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
2.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional,			Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

	Handal dan Berkompeten			Perangkat Daerah	
				Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3.	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai			Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
				Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.2 Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%
		Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	95%
		Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	95%
		Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	65%

		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%
		Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	95 %
	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	60%
		Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%
	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	60%
		Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	75%

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.3 Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD
Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%
	Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	95%
	Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	95%
	Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	65%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%
Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%

	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	95%
Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	60%
Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.	Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	60%
	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	75%

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan..	100%
2.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; 4. Reformasi birokrasi. Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah.

Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	**Sasaran 1** : . Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	**Program : Pengelolaan Keuangan Daerah**
		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
2	**Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal.	**Program : Pengelolaan Keuangan Daerah**
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
		Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
3	**Sasaran 3** : Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	**Sasaran 4 :** Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	**Program : Pengelolaan Keuangan Daerah**
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
5	**Sasaran 5** : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
		Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
6	**Sasaran 6** : Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu ada 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan beserta 76 sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam tahun 2024-2026. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
e. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
f. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
e. Penyediaan Bahan/Material
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
d. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
e. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
f. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
g. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
h. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
i. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

j. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

k. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

e. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

4. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Jumlah keseluruhan Pagu Indikatif Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 sebesar Rp.781.634.764.109,-. Penjelasan terkait Prioritas Daerah yang dijabarkan ke setiap sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Daerah yang dijabarkan kedalam Sub Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
1.	PD 4 : Reformasi Birokrasi	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	**781.634.764.109,00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**18.188.331.972,00**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**409.894.096,00**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727,00	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569,00	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	**11.562.328.600,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600,00	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000,00	
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	75.509.000,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000,00	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**20.000.000,00**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
		Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**335.843.000,00**	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000,00	
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000,00	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53.685.000,00	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.600.775.956,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.243.520,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	200.000.000,00	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000,00	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000,00	
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436,00	
		Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**234.824.000,00**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	38.824.000,00	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000,00	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.723.846.320,00**	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**300.820.000,00**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**763.446.432.137,00**	
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**11.036.154.325,00**	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	159.014.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963,00	
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**2.272.027.005,00**	
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000,00	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000,00	
		Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000,00	
		Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	738.006.500,00	
		Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	101.550.505,00	
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**2.382.903.796,00**	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296,00	
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	322.607.600,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	632.832.200,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300,00	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**2.671.638.502,00**	
		Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	333.735.212,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	560.726.990,00	
		Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300,00	
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**745.083.708.509,00**	
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484,00	
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400,00	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686,00	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939,00	

Berikut dijelaskan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2027.

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					BADAN KEUANGAN DAERAH				**781.634.764.109,00**				**781.634.764.109,00**
5	**2**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Kupang, Jakarta**	**100%**	**18.188.331.972,00**	PAD		**100%**	**18.188.331.972,00**
5	**2**	**01**	**1.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kota Kupang**	**100%**	**409.894.096,00**	PAD		**100%**	**409.894.096,00**
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	3 Dok	65.246.000,00	PAD		3 Dok	65.246.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	4 Dok	91.310.800,00	PAD		4 Dok	91.310.800,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	19 Lap	76.903.727,00	PAD		19 Lap	76.903.727,00
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	4 Lap	76.433.569,00	PAD		4 Lap	76.433.569,00
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Kupang	1 Data	50.000.000,00	PAD		1 Data	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang	1 Dokumen	50.000.000,00	PAD		1 Dokumen	50.000.000,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	**2**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kota Kupang**	**100%**	**11.562.328.600,00**	PAD		**100%**	**11.562.328.600,00**
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	73 orang/ bulan	9.070.629.000,00	DAU		73 orang/ bulan	9.070.629.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	1 Dok	2.023.606.600,00	PAD		1 Dok	2.023.606.600,00
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kupang	1 Dok	150.000.000,00	PAD		1 Dok	150.000.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	1 Dok	75.330.000,00	PAD		1 Dok	75.330.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	1 Lap	55.423.000,00	PAD		1 Lap	55.423.000,00
					Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Kupang	3 Dok	65.519.000,00	PAD		3 Dok	65.519.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Kupang	18 Lap	75.509.000,00	PAD		18 Lap	75.509.000,00
					Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	2 Dok	46.312.000,00	PAD		2 Dok	46.312.000,00
5	**2**	**01**	**1.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Kupang**	**100%**	**20.000.000,00**	PAD		**100%**	**20.000.000,00**
					Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	1 Dok	10.000.000,00	PAD		1 Dok	10.000.000,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	1 Lap	10.000.000,00	PAD		1 Lap	10.000.000,00
5	**2**	**01**	**1.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Kupang**	**100%**	**335.843.000,00**	PAD		**100%**	**335.843.000,00**
					Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	1 Dok	141.079.000,00	PAD		1 Dok	141.079.000,00
					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	1 Dok	91.079.000,00	PAD		1 Dok	91.079.000,00
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Kupang, Jakarta	15 Orang	50.000.000,00	PAD		15 Orang	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kupang	15 Orang	53.685.000,00	PAD		15 Orang	53.685.000,00
5	**2**	**01**	**1.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Kupang**	**100%**	**1.600.775.956,00**	PAD		**100%**	**1.600.775.956,00**
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	41.079.000,00	PAD		1 Paket	41.079.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	26.189.000,00	PAD		1 Paket	26.189.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	355.243.520,00	PAD		1 Paket	355.243.520,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Kupang	4 Dok	72.500.000,00	PAD		4 Dok	72.500.000,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	200.000.000,00	PAD		1 Paket	200.000.000,00
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kupang	2 Laporan	454.729.000,00	PAD		2 Laporan	454.729.000,00
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kupang, Jakarta	2 Laporan	419.129.000,00	PAD		2 Laporan	419.129.000,00
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kupang	1 Dok	31.906.436,00	PAD		1 Dok	31.906.436,00
5	**2**	**01**	**1.07**		**Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Kupang**	**100%**	**234.824.000,00**	PAD		**100%**	**234.824.000,00**
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	38.824.000,00	PAD		1 Paket	38.824.000,00
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Kupang	2 Unit	196.000.000,00	PAD		2 Unit	196.000.000,00
5	**2**	**01**	**1.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Kupang**	**100%**	**3.723.846.320,00**	PAD		**100%**	**3.723.846.320,00**
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	2 Lap	36.565.400,00	PAD		2 Lap	36.565.400,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	2 Lap	780.000.000,00	PAD		2 Lap	780.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	2 Lap	2.907.280.920,00	PAD		2 Lap	2.907.280.920,00
5	**2**	**01**	**1.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Kupang**	**100%**	**300.820.000,00**	PAD		**100%**	**300.820.000,00**
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Kupang	7 Unit	236.820.000,00	PAD		7 Unit	236.820.000,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Kupang	10 Unit	44.000.000,00	PAD		10 Unit	44.000.000,00
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Kupang	2 Unit	20.000.000,00	PAD		2 Unit	20.000.000,00
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**100%**	**763.446.432.137,00**	PAD		**100%**	**763.446.432.137,00**
5	**02**	**02**	**1.01**		**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**100%**	**11.036.154.325,00**	PAD		**100%**	**11.036.154.325,00**
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kota Kupang	2 Dok	473.651.000,00	PAD		2 Dok	473.651.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Kota Kupang	2 Dok	516.447.000,00	PAD		2 Dok	516.447.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang, UPT Pemprov. NTT, 22 Kab/Kota	34 Dok	159.014.000,00	PAD		34 Dok	159.014.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang, UPT Pemprov. NTT, 22 Kab/Kota	34 Dok	367.722.800,00	PAD		34 Dok	367.722.800,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	2 Dok	3.049.323.362,00	PAD		2 Dok	3.049.323.362,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	2 Dok	3.025.873.200,00	PAD		2 Dok	3.025.873.200,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang, Jakarta	22 Dok	3.444.122.963,00	PAD		22 Dok	3.444.122.963,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Kota Kupang, Jakarta	**100%**	**2.272.027.005,00**	PAD		**100%**	**2.272.027.005,00**
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Kupang, Jakarta, Kab/Kota	44 Laporan	434.038.000,00	PAD		44 Laporan	434.038.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	44 Laporan	435.568.000,00	PAD		44 Laporan	435.568.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	44 Laporan	452.694.000,00	PAD		44 Laporan	452.694.000,00
					Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	3 Dok	738.006.500,00	PAD		3 Dok	738.006.500,00
5	**02**	**02**	**1.02**		**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	17 Lembaga	110.170.000,00	PAD		17 Lembaga	110.170.000,00
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	2 Dok	101.550.505,00	PAD		2 Dok	101.550.505,00
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	**100%**	**2.382.903.796,00**	PAD		**100%**	**2.382.903.796,00**
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	12 Dok	433.044.296,00	PAD		12 Dok	433.044.296,00

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	2 Dok	322.607.600,00	PAD		2 Dok	322.607.600,00
	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	Kota Kupang, Jakarta	3 Dokumen	404.848.400,00	PAD		3 Dokumen	404.848.400,00
	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	12 laporan	632.832.200,00	PAD		12 laporan	632.832.200,00
	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	Kota Kupang, Jakarta	12 Dokumen	589.571.300,00	PAD		12 Dokumen	589.571.300,00
	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	**100%**	**2.671.638.502,00**	PAD		**100%**	**2.671.638.502,00**
	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	1 Dok	333.735.212,00	PAD		1 Dok	333.735.212,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	3 Lap	560.726.990,00	PAD		3 Lap	560.726.990,00
					Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta	40 Lap	770.670.000,00	PAD		40 Lap	770.670.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Kupang, Jakarta	2 Dok	1.006.506.300,00	PAD		2 Dok	1.006.506.300,00
5	**02**	**02**	**1.03**		**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Kota Kupang Jakarta, 22 Kab/Kota**	**100%**	**745.083.708.509,00**	PAD		**100%**	**745.083.708.509,00**
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Kupang	12 Laporan	47.206.923.484,00	PAD		12 Laporan	47.206.923.484,00
					Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD		1 Lap	46.356.898.400,00	PAD		1 Lap	46.356.898.400,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Kupang, Jakarta	2 Lap	22.180.954.686,00	PAD		2 Lap	22.180.954.686,00

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Kupang, Jakarta	19 Laporan	629.338.931.939,00	PAD		19 Laporan	629.338.931.939,00
					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	48 Dok	570.874.696,00	PAD		48 Dok	570.874.696,00
					Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	1 Dok	125.000.000,00	PAD		1 Dok	125.000.000,00
5	**02**	**02**	**1.04**		**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota**	**100%**	**2.756.628.301,66**	PAD		**100%**	**2.756.628.301,66**
					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Kupang	1 Lap	270.000.000,00	PAD		1 Lap	270.000.000,00
					Sub Kegiatan Rekonsialisasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	3 Dok	254.999.999,66	PAD		3 Dok	254.999.999,66

No.					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							
					Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	3 Lap	309.457.002,00	PAD		3 Lap	309.457.002,00
					Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Kupang	40 Lap	150.000.000,00	PAD		40 Lap	150.000.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Kupang, Jakarta	2 Dok	1.602.171.300,00	PAD		2 Dok	1.602.171.300,00
					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Kupang	1 Dok	70.000.000,00	PAD		1 Dok	70.000.000,00
					Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Kupang	39 Orang	100.000.000,00	PAD		39 Orang	100.000.000,00
5	**02**	**02**	**1.05**		**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**Kota Kupang, 22 Kab/Kota**	**100%**	**893.337.328.870,07**	PAD		**100%**	**893.337.328.870,07**
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Kupang	12 Laporan	221.412.830.606,00	DAU		1 Lap	221.412.830.606,00

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Kupang, 22 Kab/Kota	1 Lap	2.000.000.000,00	PAD		1 Lap	2.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Kupang	2 Lap	20.000.000.000,00	PAD		2 Lap	20.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Kupang	19 Lap	649.924.498.264,07	PAD		30 Lap	649.924.498.264,07

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 pada Badan Keuangan Daerah dan sebagai dasar evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 akan tetap mempertimbangkan ketersediaan keuangan daerah dan akan dilakukan perubahan rencana kerja jika diperlukan.

Kupang, Juli 2025

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001